

Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo di Kawasan *Geoheritage* “Tebing Breksi” Yogyakarta

Veronika Wiratna Sujarweni¹, I Made Laut Mertha Jaya²

¹Universitas Respati Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, Indonesia.

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan, D.I.Yogyakarta, Indonesia

Email: nana_wiratna@yahoo.com; Email: mad.jaya@yahoo.com.

Abstract

The existence of BUMDes is expected to improve the standard of living of the surrounding villages. For this reason, good management needs to be done in financial management. Meanwhile, the majority of management of BUMDes Sambimulyo are still not very familiar with Accounting. Therefore, the servants offered training on financial report making for the financial responsibility of BUMDes along with books on the BUMDes financial management as guidelines for BUMDes management. After the activity was completed, the participants in the business management of BumDes Sambimulyo Sambirejo Village had the ability to prepare reports and financial management of their businesses. The management of BUMDes Sambimulyo Sambirejo Village can also prepare financial statements properly and correctly. Servants also make books on financial management of BUMDes.

Keywords: *financial management of BUMDes, preparation of BUMDes financial reports.*

Abstrak

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sekitar. Untuk itu, perlu dilakukan manajemen yang baik dalam pengelolaan keuangannya. Sedangkan, para pengurus BUMDes Sambimulyo mayoritas masih belum terlalu paham dengan Akuntansi. Oleh sebab itu, pengabdian menawarkan pelatihan pembuatan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban keuangan BUMDes beserta buku pengelolaan keuangan BUMDes sebagai pedoman pengurus BUMDes. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, para peserta pengelola usaha BumDes Sambimulyo Desa Sambirejo memiliki kemampuan menyusun laporan dan pengelolaan keuangan usahanya. Pengurus BUMDes Sambimulyo Desa Sambirejo juga dapat menyusun laporan keuangan secara baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengabdian juga membuat buku tentang pengelolaan keuangan BUMDes.

Kata Kunci: pengelolaan keuangan BUMDes, penyusunan laporan keuangan BUMDes.

1. PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang yang terhitung sejak tahun 1948 tentang Undang-Undang No.22 Tahun 1948 yang membahas mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, hingga tahun 2004 tentang Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang membahas mengenai Pemerintahan Daerah belum dapat memberikan jaminan pengaturan Desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi, terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan Desa (Kurniawan, 2015).

Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke Desa ini menunjukkan salah satu bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat untuk lebih memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di setiap desa. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat juga telah menyediakan dana khusus untuk dikelola pemerintah desa secara mandiri dan berkelanjutan serta dipertanggungjawabkan. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal (87- 90) pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif masyarakat di Desa (Sidik Fajar, 2015).

Pelembagaan BUMDes untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi Desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Pemberdayaan BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa yang dimilikinya diolah secara mandiri untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes juga diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Hal ini membuktikan bahwa BUMDes dapat

menjadi wadah bagi Pemerinah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakatnya di desa. Oleh sebab itu, masyarakat di desa diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha berdikari (Adisasmita, 2013).

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Bumdes juga menjadi pilar demokrasi. BUMDes diciptakan dengan tujuannya untuk mampu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan Desa (Ginanjar, 1997). Jika pengelolaan Bumdes dilakukan secara optimal maka desa akan menjadi desa yang mandiri. BUMDes juga merupakan salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian ekonomi, sehingga BUMDes dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Badan Usaha Milik Desa dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat.

Pengaturan BUM Desa telah diatur di dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Lapananda, 2016). Sifat usaha BUM Desa adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan (Sujarweni, 2014). Kehadiran BUM Desa ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Pendirian BUM Desa juga didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berknaan dengan perencanaan dan

pendiriannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa masyarakat serta mendasari pada prinsip prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan *sustainable*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara professional dan mandiri.

Dengan dibentuknya badan usaha milik desa ini, selain pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa, namun juga BUMDes dapat mendorong meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Abidin, 2015). Namun, dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, pemilihan calon pengurus BUMDes, perencanaan program, pembentukan sampai dengan pelaksanaan program tersebut tentu masyarakat dan pemerintah desa akan menemukan beberapa hambatan-hambatan. Untuk membantu mengatasi menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut dilakukanlah pendampingan terhadap BUMDes yang ada, melalui program pengabdian bekerjasama dengan tenaga ahli yang ada di sekitar lokasi BUMDes.

Kawasan Taman Wisata Tebing Breksi berdiri di sebuah Desa bernama Desa Sambirejo, Desa ini memiliki Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang baru saja berdiri pada tahun 2018. BUMDes tersebut diberi nama BUMDes Sambimulyo. BUMDes ini memiliki beberapa unit usaha di antaranya adalah simpan pinjam dan pengelolaan Taman Wisata Tebing Breksi.

Keberadaan BUMDes ini diharapkan dapat memiliki penghasilan yang lebih untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sekitar. Untuk itu perlu dilakukan manajemen yang baik dalam pengelolaan keuangannya. BUMDes Sambimulyo masih sangat muda usianya, pengurusnya pun dipilih dari warga sekitar. Untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan kepada masyarakat perlu dibuatkan pembukuan. Selain itu, para pengurus BUMDes Sambimulyo mayoritas masih belum terlalu paham dengan Akuntansi. Oleh sebab itu, pengabdi menawarkan pelatihan pembuatan laporan

keuangan untuk pertanggungjawaban keuangan BUMDes beserta buku pengelolaan keuangan BUMDes sebagai pedoman pengurus BUMDes. *Outcome* yang diperoleh yaitu bagian keuangan BUMDes mampu menghasilkan laporan keuangan BUMDes yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban kepada desa.

2. METODE PELAKSANAAN

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Sambimulyo yang memiliki unit-unit usaha ini baru saja berdiri pada tahun 2018. BUMDes ini perlu dilakukan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang benar karena seluruh transaksi keuangan akan dipertanggungjawabkan kepada desa. Sedangkan, para pengurus BUMDes Sambimulyo mayoritas belum terlalu paham dengan akuntansi, terutama penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangannya. Dengan demikian, pengabdi menawarkan pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban keuangan BUMDes beserta buku pedoman pengelolaan keuangan BUMDes (Sulistiyani, 2004).

Pelatihan dan Pembinaan ini dilaksanakan di Kantor BUMDes Sambimulyo dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh pengabdi secara individu. Menyadari terhadap potensi dan permasalahan yang telah diuraikan maka diperlukan adanya kegiatan atau pelatihan serta pembinaan yang mampu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Tatap muka penyampaian materi dilakukan selama delapan kali pertemuan setelah itu dilakukan pendampingan. Materi penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan dibuat oleh pengabdi. Untuk itu, pembuatan buku pedomannya dilakukan oleh pengabdi setelah melakukan survey lapangan serta membaca beberapa peraturan lainnya yang mendukung dan sesuai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan dilakukan di kantor BUMDes Sambimulyo Yogyakarta,

sesuai dengan tugas dan kewajiban dari Perguruan Tinggi untuk mengaplikasikan pengetahuan bagi masyarakat yang membutuhkan serta mendukung pengabdian pada masyarakat sesuai dengan tri dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian masyarakat bagi masyarakat Yogyakarta, dilaksanakan oleh V.Wiratna Sujarweni atas nama perguruan tinggi Universitas Respati Yogyakarta dan I Made Laut Mertha Jaya atas nama perguruan tinggi STIE “BANK” Yogyakarta. Diikuti oleh pengurus keuangan BUMDes Sambimulyo. Fasilitas yang diberikan untuk pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Modul yang akan dibukukan.
2. Konsumsi
3. Alat tulis



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Bersama Anggota BUMDes Sambimulyo

Berikut ini beberapa foto selama kegiatan pengabdian yang telah dilakukan.

Pembicara dalam pengabdian masyarakat dilakukan secara mandiri berbentuk kepakaran (pelatihan), oleh: V. Wiratna Sujarweni, SE, MM, MT. dan I Made Laut Mertha Jaya, SE.,MA. Pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan di jalan Kakap 7 no 30 Minomartani Yogyakarta, pada:

Hari : Rabu, 8, 15, 22, 29 Mei
kemudian 12, 19, 26 kemudian
3, 10, 17 Juli 2019
Waktu : 13.00 – 15.00 WIB.
(Selanjutnya dilakukan
pendampingan).



Gambar 2 dan 3. Kegiatan evaluasi dan diskusi topik Anggota BUMDes Sambimulyo

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sudah dilakukan dengan tujuan, yaitu bagian keuangan BUMDes dapat menyusun laporan keuangan dan mengelola keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada desa. Pengabdian telah menyelesaikan buku pengelolaan keuangan BUMDes sebagai panduan bagian keuangan membuat laporan keuangan untuk pengelolaan keuangan BUMDes.

Pengabdian kepada masyarakat telah selesai dilakukan oleh pengabdian dengan menggunakan metode kepakaran atau pelatihan. Selain itu, pengabdian juga melakukan evaluasi dan diskusi bersama dengan beberapa anggota BUMDes Sambimulyo. Hal ini guna kegiatan pengabdian yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BUMDes dan tepat sasaran. Jumlah tatap muka dilaksanakan sebanyak 10 kali, untuk setiap tatap muka membutuhkan waktu 2 jam. Peserta adalah pengelola dan penyusun laporan keuangan BUMDes yang bertempat di kantor BUMDes Sambimulyo. Selanjutnya, akan dilakukan pendampingan oleh pengabdian. Peserta pelatihan diberikan materi secara bertahap, yaitu seluk beluk BUMDes,

landasan hukum BUMDes, Pendirian BUMDes, prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes, laporan keuangan unit usaha BUMDes, Praktek pembukuan BUMDes.

Setelah diberi materi peserta diajak berdialog dengan tanya jawab menyangkut materi yang telah disampaikan. Sedangkan, hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program kegiatan pengabdian ini adalah peserta langsung dapat menerapkan pembuatan laporan keuangan ini dengan transaksi yang terjadi di BUMDes Sambimulyo.

4. KESIMPULAN

- a. Peserta pengelola usaha BumDes Sambimulyo Desa Sambirejo memiliki kemampuan menyusun laporan dan pengelolaan keuangan usahanya, serta pengabdian juga akan melakukan pendampingan.
- b. Pengurus BUMDes Sambimulyo Desa Sambirejo dapat menyusun laporan keuangan secara baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pengabdian membuat buku tentang pengelolaan keuangan BUMDes.

Saran:

- a. Mengingat pelatihan penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan BumDes ini sangat penting bagi para peserta pengelola usaha BumDes, maka disarankan kegiatan ini dapat disosialisasikan dan berkelanjutan serta membuahkan hasil guna mendukung program pemerintah desa untuk menjadi desa mandiri dan maju demi kesejahteraan rakyat.
- b. Kegiatan yang telah dilakukan mampu menumbuhkan antusias peserta yang tercermin dari keseriusan dalam mengajukan berbagai macam pertanyaan, diskusi dan memahami ilustrasi soal praktek yang diberikan oleh pengabdian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z, 2015, Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6 (1), 61–76.
- Adisasmita, Rahardjo, 2013, *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Ginanjari, Kartasmita, 1997, *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniawan, Boni, 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Lapananda, Y, 2016, *Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Sidik, Fajar, 2015, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* Vol 19 No 2 -p-ISSN 0852-9213, eISSN 2477-4693.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Akuntansi Desa*, Pustaka Baru.
- Sulistiyani, A.T, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media.